

PANDANGAN EKONOMI ISLAM PADA DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI JAWA BARAT

Muhammad Zaky

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: muhazaky@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Indonesia kaya dan beragam secara geografis, bahasa, etnis dan budaya. Keunikan ini berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi pada setiap daerah. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pandangan ekonomi Islam terhadap desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, mencerminkan minat untuk mengeksplorasi hubungan antara prinsip ekonomi Islam, sistem desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menganalisis kajian kebijakan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review. Secara keseluruhan, hasil positif dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di 27 kabupaten/kota administratif Provinsi Jawa Barat stabil setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan perekonomian daerah berada dalam keadaan yang cukup baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu untuk mencapai keseimbangan, dengan tujuan akhir kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat (falah). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka merupakan yang tertinggi di antara 27 kabupaten/kota administratif di Provinsi Jawa Barat, sehingga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Jawa Barat

ABSTRACT

Indonesia is rich and diverse geographically, linguistically, ethnically and culturally. This uniqueness has a significant impact on the economic development of each region. This study, which aims to analyze Islamic economic views on fiscal decentralization and economic growth in the province of West Java, reflects an interest in exploring the relationship between Islamic economic principles, the fiscal decentralization system, and its impact on economic growth. To analyze the study of fiscal decentralized policy and economic growth from an Islamic perspective, this study used a qualitative approach using the literature review method. Overall, the positive results of this study are that economic growth in the 27 administrative regions/cities of West Java Province is stable every year. This shows that the process of regional economic development is in a fairly good state. The results of this study are consistent with the goals of Islamic economics, namely to achieve a balance with the ultimate goal of happiness in this world and happiness in the Hereafter (falah). The economic growth of Majalengka Regency is the highest among the 27 administrative regions/cities in West Java Province, which shows good economic growth in the region.

Keywords: *Islamic economics, Fiscal decentralization, economic growth, West Java*

PENDAHULUAN

Mengingat Indonesia terdiri dari ratusan pulau, maka secara logika setiap daerah akan memiliki ciri-ciri unik yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Perbedaan wilayah berdampak signifikan terhadap pola pembangunan ekonomi, sehingga menghasilkan pola pertumbuhan yang berbeda-beda di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi bisa cepat di beberapa wilayah, namun lebih lambat di wilayah lain, fenomena seperti ini adalah hal yang umum terjadi dalam konteks desentralisasi fiskal yang pada akhirnya terjadi kesenjangan dalam keuangan daerah dan pembangunan sebagai akibat dari kesenjangan dalam potensi pertumbuhan ini.

Mempertimbangkan permasalahan ini, kami meyakini bahwa dalam mempertimbangkan perkembangan perekonomian di berbagai wilayah di Indonesia, prinsip-prinsip Syariah Islam perlu diperhatikan, termasuk aspek-aspek seperti keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan kekayaan.

Beberapa aspek yang dapat menjadi fokus kajian dan membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terkait perspektif ekonomi Islam terhadap kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Integrasi perspektif ekonomi Islam ke dalam kajian pembangunan ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap prinsip dan nilai-nilai lokal. Hal ini dapat membuka jalan bagi pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai dan kerangka budaya lokal serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori dan praktik perekonomian daerah.

Ekonomi Islam mempunyai daya tarik tersendiri di berbagai daerah karena sifatnya yang universal. Ada beberapa aspek yang memperkuat pandangan bahwa sistem ekonomi Islam bersifat universal, seperti keadilan ekonomi, inklusi masyarakat, prinsip keberlanjutan, larangan konsesi, dan kebaikan bersama. Namun, penting untuk diingat bahwa adopsi dan penerimaan sistem ekonomi Islam dapat berbeda-beda tergantung konteks dan masyarakat. Meskipun prinsip-prinsip ini mungkin bersifat universal, tetapi cara penerapannya dapat dipengaruhi oleh konteks budaya, politik, dan ekonomi setempat.

Permasalahan paling mendesak di Indonesia, khususnya kemiskinan menjadi fokus perhatian politik mulai dari ibu kota hingga daerah. Definisi kemiskinan yang tersebut sesuai dengan pendekatan yang umum digunakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Pengukuran kemiskinan berbasis biaya merupakan pendekatan yang umum dilakukan di banyak negara, termasuk Indonesia. Indeks kemiskinan yang dihitung berdasarkan pengeluaran biasanya menggambarkan proporsi penduduk yang tingkat pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan tertentu. (BPS, 2020).

Hubungan antara pemerintahan negara dan daerah merupakan suatu hal

yang luas dan kompleks yang dapat dianalisis dari berbagai bidang. Diskusi ini mencakup aspek-aspek seperti otonomi daerah, desentralisasi, tata kelola pemerintahan, kebijakan ekonomi regional, serta implikasi politik dan sosialnya. Diskusi ini sering kali melibatkan perbandingan model pemerintahan di berbagai negara dan pemahaman terhadap dampak kebijakan tertentu terhadap pembangunan daerah. Hal ini menekankan pentingnya dialog, koordinasi dan kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah secara bersama-sama. Sinergi antara kedua tingkat pengelolaan ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara umum (Oates, 1999). Pengaturan ini disebut sebagai otonomi daerah. Secara harfiah, otonomi adalah kemampuan untuk mengelola diri sendiri atau memiliki aturan dan hukum sendiri. Prinsip otonomi daerah bertujuan untuk memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Penerapan otonomi daerah dapat bervariasi di setiap negara dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor tergantung pada sistem administrasi dan kebijakan nasionalnya. Namun secara umum, penentuan nasib sendiri daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan partisipasi aktif warga negara dalam membentuk kebijakan dan menentukan arah pembangunan. Otonomi daerah dapat diwujudkan melalui undang-undang, konstitusi, atau peraturan daerah yang memberikan dasar hukum bagi pemberian wewenang kepada pemerintah daerah. Model dan tingkat otonomi dapat bervariasi antar negara, tergantung pada sistem pemerintahan dan kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, mengurus urusan rumah tangga sendiri atau mengaturnya merupakan definisi otonomi (Sumodiningrat & Jusuf, 2004).

Era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Otonomi Daerah) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut saat itu menjadi landasan hukum reformasi administrasi daerah di Indonesia.

Tiga konsep digunakan untuk mendefinisikan desentralisasi oleh Bird & Francois Vaillancourt, (1998): dekonsentrasi, pendelegasian, dan desentralisasi. Desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada kantor-kantor cabang atau badan-badan pemerintah daerah yang masih berada dalam satu kewenangan atau departemen. Ketika pemerintah menjalankan tugas-tugas tertentu sebagai instansi pemerintah pusat, hal ini dikenal sebagai pendelegasian. Desentralisasi mengacu pada sistem di mana pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan selain menjalankan perintah pemerintah pusat.

Disisi lain kajian mengenai desentralisasi fiskal dapat menjadi lebih kuat dan terinformasi secara baik, seperti yang dilakukan oleh Dirgantoro et al., (2009) menyatakan dalam proses pembangunan Provinsi Jawa Barat terjadi perubahan struktur perekonomiannya. Pada saat yang sama, kontribusi sektor pertanian juga mengalami penurunan yang otomatis menyebabkan peningkatan kontribusi produksi sektor industri. Dengan menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memperoleh kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur perekonomian daerah serta pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan produk domestik bruto (PDB), kenaikan pajak mempunyai dampak berbeda terhadap sektor non pertanian dan pertanian. Penelitian serupa juga terjadi di daerah Sumatera Utara yang dilakukan oleh Putra & Yeniwati, (2022). Dikatakan bahwa ketika derajat desentralisasi fiskal meningkat maka pertumbuhan ekonomi melambat sangat signifikan,

sebaliknya jika derajat desentralisasi anggaran menurun maka pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan. PAD bangunan desentralisasi fiskal, ternyata gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara bahkan menjadi salah satu faktor melambatnya pertumbuhan ekonomi. Lebih luas lagi Khamdana, (2016) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa desentralisasi fiskal belum terlalu berhasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti asumsi sebelumnya, mencerminkan kenyataan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan ini.

Deskripsi hasil penelitian di atas baik di Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, dan beberapa wilayah di Indonesia hanya berfokus pada variabel kebijakan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi ekonomi. Sementara itu, terdapat variabel tambahan dalam penelitian artikel ini yaitu pandangan ekonomi Islam terhadap desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Jadi variabel ekonomi Islam inilah yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan kajian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam pada desentralisasi kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, juga untuk memahami dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural perekonomian di Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2022.

TINJAUAN TEORI

A. Ekonomi Islam

Perkembangan dan pertumbuhan sistem ekonomi Islam di berbagai daerah di Indonesia sebenarnya mencerminkan ketertarikan dan dukungan terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam diartikan sebagai ilmu multidimensi atau multidisipliner dan ilmu rasional yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Rivai & Buchari, 2013). Dalam sistem perekonomian inilah nilai-nilai Islam menjadi landasan dan landasan dalam segala aktivitas. Dalam ilmu ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan tanggung jawab negara terhadap hak-hak masyarakat, sehingga kebijakan fiskal tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun terutama untuk menciptakan mekanisme distribusi perekonomian yang berkeadilan (Novita et al., 2023). Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu yang mencakup nilai-nilai etika, keadilan dan keberlanjutan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka ekonomi Islam memiliki keterbatasan tertentu dalam kaitannya dengan ajaran Islam dan kebebasan individu memiliki keterbatasan untuk menjamin perilaku makroekonomi yang berkelanjutan. (Nasution, 2006).

B. Desentralisasi Fiskal

Penyelenggaraan otonomi fiskal dan desentralisasi dicapai pada tanggal 1 Januari 2001 dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Pada saat itu, kedua undang-undang tersebut menimbulkan beberapa masalah, yang kemudian diselesaikan oleh pemerintah. Secara umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan bagian dari upaya memberikan otonomi dan kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mulai berlaku pada bulan

Desember 2004 (RPJMN 2004-2009).

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah (pemerintah pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Ebel & Yilmaz Serdar, (2002) Desentralisasi mempunyai tiga bentuk atau varian yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat independen pengambilan keputusan daerah. Pertama, *Decontretation* yaitu pengalihan otoritas dari lembaga pemerintah pusat kepada perwakilan pemerintah lokal. Kedua, *Delegation* yaitu pemerintah pusat mendelegasikan tanggung jawab atau wewenang tertentu kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas nasional. Ketiga, *Devolution* yaitu mengalihkan fungsi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang diberi wewenang untuk mengelola pendapatan dan belanja daerah.

Selama ini desentralisasi fiskal di Indonesia lebih sejalan dengan konsep desentralisasi yang ketiga (*devolution*). Hal ini sejalan dengan pendapat Slinko, (2002) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal mengacu pada pengalihan tanggung jawab fiskal atau keuangan dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Proses ini melibatkan pendelegasian wewenang atas pendapatan dan pengeluaran kepada unit-unit di tingkat lokal.

Pernyataan Slinko menekankan pentingnya desentralisasi fiskal sebagai bentuk pengalihan kewenangan (tanggung jawab dan fungsi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, misalnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola belanja pendapatan daerahnya. Tujuan dari pengenalan ini adalah untuk mendekatkan pemerintah dan masyarakat sehingga pemerintah dapat berfungsi lebih baik dan lebih efisien dalam kondisi seperti ini (Rasyid, 2007). Melalui desentralisasi fiskal, diharapkan bahwa pemerintah daerah

dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika lokal, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana dan pelayanan publik (Prawirosetoto, 2022). Dengan memberikan otonomi fiskal kepada pemerintah daerah, mereka menjadi lebih bertanggung jawab di tingkat daerah dalam berbagai aspek penyediaan layanan publik.

Penerapan desentralisasi kebijakan fiskal dapat memberikan banyak manfaat baik bagi pemerintah pusat maupun daerah (Ebel & Yilmaz Serdar, 2002), antara lain efisiensi dan alokasi sumber-sumber ekonomi yaitu desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, dengan adanya desentralisasi fiskal dan persaingan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi terciptanya pelayanan publik yang lebih efisien dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.

Penyebaran fiskal daerah sering diukur dengan dua variabel yaitu belanja daerah dan pendapatan daerah. Ebel & Yilmaz Serdar (2002), menyatakan mengukur diversifikasi bukanlah tugas yang mudah disebabkan oleh perbedaan tujuan, kondisi sosio-ekonomi, sistem politik, dan kebijakan nasional masing-masing negara. Variasi dalam penggunaan variabel dan ukuran yang digunakan oleh peneliti. Ini mencerminkan keragaman pendekatan dan metodologi yang dapat diambil dalam analisis terkait dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah.

Rasio PAD terhadap TPD dapat memberikan gambaran mengenai kemandirian fiskal suatu daerah, namun perlu diingat bahwa rasio ini merupakan salah satu dari beberapa indikator dan tidak dapat memberikan gambaran yang utuh dengan sendirinya. Meskipun PAD dan TPD tidak

mengukur pengeluaran secara langsung, fokus pada pendapatan memberikan gambaran sejauh mana pemerintah kota memiliki otonomi fiskal untuk mengelola dan memutuskan sumber daya keuangan mereka sendiri.

C. Kebijakan Investasi

Dalam konteks perekonomian, investasi berarti pengeluaran yang dilakukan pemerintah atau swasta untuk memperoleh barang modal atau aset produktif yang dapat digunakan dalam proses produksi di masa depan. Investasi berarti pertumbuhan modal dalam negeri dan stok barang, seperti pembangunan fasilitas produksi dan barang investasi sepanjang tahun. Investasi adalah suatu langkah yang mengorbankan konsumsi di masa depan. (Samuelson, A. Paul & Wiliam, 2004). Menurut pengertian di atas, penanaman modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang dapat berupa modal, bangunan, barang modal, persediaan, dan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan memproduksi barang atau jasa atau untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Pemerintah harus melakukan kebijakan investasi yang tepat dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, kebijakan investasi yang tidak tepat akan berdampak pada keinginan investor dalam menginvestasikan keuangan mereka. Semakin baik kebijakan investasi maka pertumbuhan investasi akan semakin meningkat dan dapat berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

D. Kebijakan Tenaga Kerja

Proses peningkatan laju pertumbuhan ekonomi negara harus didukung dengan laju pertumbuhan tenaga kerja yang dikemas dalam kebijakan yang tepat. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan kerja adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan diri sendiri dan masyarakat. Pernyataan tersebut memberikan gambaran umum tentang dua

kelompok penduduk utama di negara ini, yaitu kelompok pekerja dan pengangguran. Konsep kerja mencakup orang-orang yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi baik di sektor formal maupun informal dan yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPAK memberikan gambaran sejauh mana penduduk usia kerja terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian. Nilai TPAK yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan rendahnya partisipasi ekonomi penduduk usia kerja. (Hellen et al., 2018).

D. Pertumbuhan Ekonomi

Melihat definisi dari beberapa ahli, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan negara dalam meningkatkan produksi berbagai barang dan jasa dalam jangka panjang (Zulyanto, 2010). Sedangkan menurut Rustiono (2008), yang dikutip dari Sukirno, pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan positif pada aktivitas perekonomian suatu negara atau wilayah, khususnya pertumbuhan produksi barang dan jasa. Tarigan (2004), menjelaskan pengertian Pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya berarti peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup faktor-faktor yang meningkatkan kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara melibatkan sejumlah faktor dan komponen yang kompleks. Namun, ada tiga faktor atau komponen utama yang sering dianggap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Todaro & Smith, 2006). Ketiga komponen tersebut adalah akumulasi modal melibatkan pengumpulan dan peningkatan berbagai bentuk investasi yang ditanamkan dalam berbagai aspek ekonomi, Meningkatnya pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi besar kecilnya angkatan kerja suatu negara atau wilayah dan perkembangan teknologi secara signifikan dapat meningkatkan penerapan pengetahuan baru, termasuk penemuan dan inovasi di berbagai bidang, baik dari segi fisik maupun sumber daya manusia.

Pandangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi menempatkan penekanan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berasal dari faktor-faktor produksi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pertumbuhan ekonomi mencakup aspek pertumbuhan dan kemajuan yang lebih luas dalam aspek material dan spiritual manusia. Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi kehidupan manusia saja, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek hukum, sosial, politik, dan budaya (Muttaqin, 2018).

Secara teoritis, desentralisasi fiskal diharapkan dapat membawa perbaikan perekonomian, karena pemerintah daerah dekat dengan masyarakat dan mempunyai informasi yang lebih baik untuk pelayanan publik dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kaitan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada dua asumsi: Pertama, keberhasilan desentralisasi bergantung pada beberapa faktor seperti kapasitas pemerintah daerah, tingkat partisipasi masyarakat, dan mekanisme koordinasi antar bagian pemerintah; Kedua, Adanya persaingan yang dapat menciptakan insentif positif bagi inovasi dan peningkatan kualitas layanan (Khamdana, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua besar yaitu Asia bagian utara dan benua Australia bagian selatan. Indonesia juga berada di persimpangan dua samudera, yaitu Samudera Hindia di sebelah barat dan Samudera Pasifik di sebelah timur. Sebagai informasi tambahan, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur. Persebaran geografis Indonesia sangat mempengaruhi keanekaragaman budaya, lingkungan, dan kekayaan alam yang dimilikinya.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023 III (persen)

No	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi					Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023 III	
1	Provinsi Aceh	4.14	-0.37	2.79	4.21	3.76	2.91
2	Provinsi Sumatera Utara	5.22	-1.07	2.61	4.73	4.94	3.29
3	Provinsi Sumatera Barat	5.01	-1.61	3.29	4.36	4.3	3.07
4	Provinsi Riau	2.81	-1.13	3.36	4.55	4.02	2.72
5	Provinsi Jambi	4.35	-0.51	3.69	5.13	4.9	3.51
6	Provinsi Sumatera Selatan	5.69	-0.11	3.58	5.23	5.08	3.89
7	Provinsi Bengkulu	4.94	-0.02	3.27	4.31	3.96	3.29
8	Provinsi Lampung	5.26	-1.66	2.77	4.28	3.93	2.92
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.32	-2.29	5.05	4.4	4.01	2.90
10	Provinsi Kepulauan Riau	4.83	-3.8	3.43	5.09	4.88	2.89
11	Provinsi DKI Jakarta	5.82	-2.39	3.56	5.25	4.93	3.43
12	Provinsi Jawa Barat	5.02	-2.52	3.74	5.45	4.57	3.25
13	Provinsi Jawa Tengah	5.36	-2.65	3.33	5.31	4.92	3.25
14	Provinsi DI Yogyakarta	6.59	-2.67	5.58	5.15	4.96	3.92
15	Provinsi Jawa Timur	5.53	-2.33	3.56	5.34	4.86	3.39
16	Provinsi Banten	5.26	-3.39	4.49	5.03	4.97	3.27
17	Provinsi Bali	5.6	-9.34	-2.46	4.84	5.35	0.80
18	Provinsi NTB	3.9	-0.62	2.3	6.95	1.58	2.82
19	Provinsi NTT	5.25	-0.84	2.52	3.05	2.08	2.41
20	Provinsi Kalimantan Barat	5.09	-1.82	4.8	5.07	4.27	3.48
21	Provinsi Kalimantan Tengah	6.12	-1.41	3.59	6.45	3.74	3.70
22	Provinsi Kalimantan Selatan	4.09	-1.82	3.48	5.11	4.57	3.09
23	Provinsi Kalimantan Timur	4.7	-2.9	2.55	4.48	5.29	2.82
24	Provinsi Kalimantan Utara	6.89	-1.09	3.98	5.34	4.79	3.98
25	Provinsi Sulawesi Utara	5.65	-0.99	4.16	5.42	5.4	3.93
26	Provinsi Sulawesi Tengah	8.83	4.86	11.7	15.17	13.0	10.7
27	Provinsi Sulawesi Selatan	6.91	-0.71	4.64	5.09	4.05	4.00
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	6.5	-0.65	4.1	5.53	4.92	4.08
29	Provinsi Gorontalo	6.4	-0.02	2.41	4.04	4.62	3.49
30	Provinsi Sulawesi Barat	5.56	-2.34	2.57	2.3	7.5	3.12
31	Provinsi Maluku	5.41	-0.91	3.05	5.11	5.69	3.67
32	Provinsi Maluku Utara	6.25	5.39	16.79	22.94	25.1	15.3
33	Provinsi Papua Barat	2.66	-0.76	-0.51	2.01	3.73	1.43
34	Provinsi Papua	-15	2.39	15.16	8.97	8.28	3.81

Sumber: SIMREG Bappenas

Berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) tingkat provinsi tahun

2019-2023, data percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah Tengah menunjukkan positif perkembangan perekonomian daerah. Informasi tersebut disajikan dalam tabel 1.1. Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara dan terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat yang sama, terlihat pula perbedaan pendapatan antar daerah yang cukup besar. Perbedaan Indonesia bagian barat dan timur melibatkan beberapa faktor, antara lain geografis, demografi, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun perkembangan positif terjadi di wilayah timur Indonesia, pencapaian tersebut tidak bisa menandingi pencapaian pembangunan di wilayah barat. Hal tersebut terjadi karena Wilayah barat dan timur Indonesia dipisahkan oleh jarak geografis yang cukup jauh. Sehingga jarak yang jauh ini dapat mempengaruhi hubungan fisik, transportasi dan perdagangan antara kedua wilayah tersebut.

Provinsi Jawa Barat memiliki batas wilayah yang jelas. Uraian batas wilayah provinsi Jawa Barat memberikan gambaran mengenai letak, batas wilayah, luas wilayah, dan kepadatan penduduk provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terpenting di Indonesia, mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan keanekaragaman budaya wilayah Jawa. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota, dan setiap entitas administratif tersebut memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Masing-masing Kabupaten dan Kota memiliki karakteristik unik, sumber daya, dan potensi ekonomi yang berbeda, yang memberikan kontribusi terhadap keberagaman dan kekayaan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Pada Tabel 1.2 di bawah ini terlihat pertumbuhan ekonomi berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat:

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022 (persen)

Wilayah Jawa Barat	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Persen)			
	2020	2021	2022	Rata-rata
Tasikmalaya	-0.98	3.43	4.70	2.38
Sumedang	-1.12	3.17	5.03	2.36
Sukabumi	-0.91	3.74	5.12	2.65
Subang	-1.15	2.18	4.21	1.75
Purwakarta	-2.13	3.42	5.24	2.18
Pangandaran	-0.05	3.67	5.03	2.88
Majalengka	0.89	4.75	6.63	4.09
Kuningan	0.11	3.56	5.53	3.07
Kota Tasikmalaya	-2.01	3.57	5.01	2.19
Kota Sukabumi	-1.49	3.71	5.35	2.52
Kota Depok	-1.92	3.76	5.24	2.36
Kota Cirebon	-0.98	3.05	5.10	2.39
Kota Cimahi	-2.26	4.19	5.92	2.62
Kota Bogor	-0.41	3.76	5.65	3.00
Kota Bekasi	-2.58	3.22	4.96	1.87
Kota Banjar	0.94	3.49	4.19	2.87
Kota Bandung	-2.28	3.76	5.41	2.30
Karawang	-3.80	5.85	6.31	2.79
Indramayu	-1.58	0.58	2.88	0.63
Garut	-1.26	3.58	5.08	2.47
Cirebon	-1.08	2.47	4.09	1.83
Cianjur	-0.77	3.48	5.04	2.58
Ciamis	-0.14	3.66	5.02	2.85
Bogor	-1.76	3.55	5.25	2.35
Bekasi	-3.39	3.62	5.30	1.84
Bandung Barat	-2.41	3.46	5.34	2.13
Bandung	-1.80	3.56	5.35	2.37
St Dev	1.12	0.84	0.69	

Sumber: Portal Jabargoid

Tahun demi tahun, stabilnya pertumbuhan ekonomi di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat dianggap sebagai indikator positif perkembangan perekonomian daerah. Selain itu, penurunan standar deviasi tahunan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 di provinsi Jawa Barat dapat diartikan sebagai indikator stabilnya pertumbuhan ekonomi setiap daerah/kota di provinsi tersebut.

Dalam perspektif Islam, tujuan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum Islam secara keseluruhan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah, yang dapat diterjemahkan sebagai kebahagiaan, kekayaan,

dan kesuksesan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan perekonomian, ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, berkeadilan, dan memenuhi kebutuhan spiritual dan material masyarakat. Kestabilan pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat menunjukkan sunatullah dari sisi keseimbangan. Konsep "Hidup seimbang" atau "*Ummatan Wasatan*" merupakan salah satu ajaran sentral dalam Islam. Ungkapan "*Ummatan Wasatan*" sendiri berasal dari Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:143), yang berarti "umat yang adil" atau "umat yang berada di tengah-tengah." Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk spiritual dan materi. Dengan mengamalkan prinsip *Ummatan Wasatan*, umat Islam diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang seimbang, adil, dan harmonis di dunia, sambil mengejar kebahagiaan di akhirat. Konsep ini merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang mendukung kehidupan yang berdaya, bertanggung jawab, dan menumbuhkan nilai etika dan moral. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan ekonomi dapat membentuk masyarakat yang seimbang dan berdaya di mana aspek material dan spiritual tidak saling bertentangan tetapi saling mendukung. Ini adalah bagian integral dari pemahaman Islam tentang kehidupan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat (Amirudin, 2015). Sehingga kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, hal ini terjadi karena pertumbuhan tersebut sudah mencerminkan keseimbangan dan pemerataan ekonomi, pemerataan kekayaan, serta mempertimbangkan aspek spiritual dan moral dalam kegiatan ekonomi.

Secara total, pertumbuhan ekonomi 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memberikan dampak positif dan signifikan. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat adalah Kabupaten Majalengka dengan rata-

rata pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 4,09%, disusul Kabupaten Kuningan sebesar 3,07% dan Kota Bogor pada peringkat ketiga dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 3% per tahun. Daerah yang pertumbuhan ekonominya paling rendah adalah Kota Subang dengan rata-rata PDB per kapita sebesar 1,75% per tahun.

Dari sudut pandang konseptual, pemerintah berperan besar dalam menciptakan anggaran yang mendukung kinerja industri nyata melalui investasi langsung, konsumsi dan investasi, dan dorongan para pelaku ekonomi (Hellen et al., 2018). Outputnya sebagaimana ditentukan oleh PDB sektoral, adalah hasil dari alokasi anggaran. Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi lokasi berikutnya untuk menyusun rencana pembangunan baru dengan melihat outputnya (PDRB). Ketika cara pembangunan ini di implementasikan, hal ini akan mempengaruhi perubahan perekonomian dan pasar tenaga kerja.

Struktur tenaga kerja dan perekonomian di Jawa Barat berubah seiring dengan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa seiring berjalannya pembangunan, kontribusi sektor manufaktur terhadap output akan meningkat dan kontribusi sektor pertanian terhadap output akan menurun, dengan kontribusi sektor terhadap output tetap relatif konstan (Sodik & Nuryadin, 2005). Industri pengolahan, sektor lain, dan sektor pertanian mengalami perubahan struktur ekonomi, namun pergeseran struktur kekuasaan tidak selalu mengikuti.

Pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengontrol dari mana uang mereka berasal dan berapa banyak yang mereka belanjakan sesuai dengan kebijakan desentralisasi fiskal (Nurlaela et al., 2018). Pemerintah daerah berupaya untuk memanfaatkan potensi daerah mereka untuk menghasilkan pendapatan, terutama melalui pajak dan pungutan di sektor pendapatan. PDB per kapita menunjukkan kondisi ekonomi yang menjadi pertimbangan

saat memungut pajak dan pungutan oleh pemerintah. Kemampuan ekonomi lokal dan penduduk untuk menghasilkan bagi hasil dan alokasi uang secara umum untuk pemerintah daerah akan dipengaruhi oleh Pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan inflasi.

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tampak mengalami percepatan pada triwulan 2019 hingga 2023. Percepatan pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi secara umum. Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 34.816 km² dan 27 kabupaten kota masih cukup baik dengan rata-rata 3,25 dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat cukup stabil setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, terutama keseimbangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat (falah). Pencapaian keseimbangan dan keselarasan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan suatu pencapaian yang diinginkan, mengingat prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berdaya. Dengan demikian, dapat tercipta masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kebahagiaan sebagaimana diinginkan oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kabupaten Majalengka memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat dengan rata-rata 4,09 persen per tahun, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian wilayah tersebut cukup positif dalam kurun waktu tertentu. Namun, kita dapat melihat bahwa terdapat perbedaan pendapatan yang besar tergantung pada wilayahnya. Anggaran pemerintah memiliki fungsi penting dalam menggerakkan dan memacu sektor riil ekonomi, yang mencakup industri, pertanian, dan sektor jasa yang terlibat langsung dalam produksi barang dan jasa. Dengan merencanakan kebijakan

anggaran yang cerdas dan efektif, pemerintah dapat menjadi pemain penting untuk merangsang sektor riil perekonomian, meningkatkan pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Desentralisasi kebijakan fiskal khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan daerah di Jawa Barat atau daerah lain dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi kebijakan fiskal, memberikan kekuasaan dan tanggung jawab lebih kepada pemerintah daerah. Penting untuk melanjutkan pemantauan dan evaluasi yang komprehensif terhadap dampak desentralisasi fiskal, termasuk aspek-aspek seperti distribusi pendapatan, pelayanan publik dan keadilan sosial. Pemahaman menyeluruh mengenai potensi hasil dan tantangan sangat penting dalam merancang, menyempurnakan, dan mengadaptasi kebijakan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Keterbatasan Penelitian dan Studi Lanjut

Dalam penelitian mengenai Pandangan Ekonomi Islam Pada Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Jawa Barat ini terdapat beberapa keterbatasan. Pertama keterbatasan waktu yang singkat sehingga riset tidak bisa terlalu begitu mendalam. Kedua penelitian hanya terfokus pada metode literature review yang mana kurang bisa membuahkan hasil dari karya ilmiah ini sendiri, hal ini disebabkan oleh keterbatasan berpikir, perbedaan asumsi dan pemahaman peneliti, serta faktor lain seperti waktu dan informasi yang tersedia. Sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode penelitian eksperimen atau survei dalam mengkaji kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa saran yang dapat diberikan Pertama untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dikumpulkan lebih banyak sampel dengan berbagai metode untuk meningkatkan keakuratan data penelitian, sebaiknya dilakukan penelitian secara berkesinambungan agar kita dapat melihat dan mengevaluasi

perubahan dari variabel tersebut, situasi dan keadaan dan pada akhirnya diharapkan semakin banyak variabel dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi banyak hal. Kedua, untuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat Potensi daerah perlu dikelola dengan lebih baik lagi oleh pemerintah daerah tersebut. Untuk memaksimalkan mekanisme PAD yang telah tunduk pada peraturan perundang-undangan. Provinsi Jawa Barat harus mampu merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat berdasarkan keunikan keadaan yang ada di daerah. Kesuksesan membutuhkan pendanaan yang memadai dan tenaga kerja yang berkualitas dengan menggunakan teknologi informasi yang semakin maju. Pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan juga jadi salah satu faktor penting yang diperlukan selain pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan. Untuk kepentingan kesejahteraan umum dan pelayanan yang lebih baik, pemda harus didesak Agar pengelolaan kawasan lebih efektif dan efisien. Peningkatan infrastruktur dan layanan publik akan meningkatkan kesadaranwajib pajak dan mendorong lebih banyak pembayaran ke APBD secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, K. (2015). Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Economics, Social and Development Studies*, 2(1), 62–75.
- Bird, R. M., & Francois Vaillancourt. (1998). *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang: Tinjauan Umum, dalam Richard Bird dan Francois Vailancourt*. Gramedia Pusaka Utama.
- Dirgantoro, M. A., Mangkuprawira, S. . S. H., & Sinaga, B. M. (2009). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Transformasi Ekonomi Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5(1).
- Ebel, R., & Yilmaz Serdar. (2002). Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview. *World Bank Institute*.
- Hellen, H., Mintarti, S., & Fitriadi, F. (2018). Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. *Inovasi*, 13(1), 28. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2490>
- Khamdana, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia, 2008 – 2012. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 23–38.

- <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.59>
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic: *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, Maro, 1*(2), h. 117-122.
- Nasution, E. M. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana.
- Novita, Y., Agustine, R. I., & Pratama, A. A. N. (2023). Analisis Desentralisasi Fiskal Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, 2*(2), 206–215. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1402>
- Nurlaela, C., Hidayati, N., & Mahsuni, A. W. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *E-Jra, 07*(10), 119–131.
- Oates, E. W. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature, 37*(3), 1120–1149.
- Prawirosetoto, F. X. Y. (2022). Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis, 2*(2), 132–143.
- Putra, R. E., & Yeniwati, Y. (2022). Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan, 11*(2), 98. <https://doi.org/10.24036/ecosains.12073157.00>
- Rasyid, M. R. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (H. Syamsudin (ed.)). LIPI.
- Rivai, V., & Buchari, A. (2013). *Islamic Economics* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Rustiono, D. (2008). *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah*. UNDIP.
- Samuelson, A. Paul & Wiliam, D. N. (2004). *Ilmu Makro Ekonomi* (Tujuh Bela). Erlangga.
- Slinko, I. (2002). *The Impact of Fiscal Decentralization on the Budget Revenue Inequality among Municipalities and Growth of Russian regions*.
- Sodik, J., & Nuryadin, D. N. (2005). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia (Studi Kasus Pada 26 Propinsi). In *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*. <http://journal.umy.ac.id/index.php/esp/>
- Sumodiningrat, G., & Jusuf, M. K. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan: upaya-upaya pengurangan pengangguran dan pemberdayaan usaha mikro di tingkat lokal*.
- Tarigan, R. (2004). *Perencanaan Pembangunanann Wilayah*. PT. Bumi Aksara.
- Todaro, P. M., & Smith, C. S. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Erlangga.
- Zulyanto, A. (2010). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Bengkulu*. http://eprints.undip.ac.id/23796/1/Aan_Zulyanto.pdf